

Press Release**Ironi 81 Tahun Merdeka: Titik Panas di Ekosistem Gambut Melonjak 549 Persen pada Juli 2026****Jakarta, 10 Agustus 2026**

Penggaungan tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” oleh pemerintah seharusnya tercermin dalam kendali masyarakat atas ruang hidup yang aman. Namun, 81 tahun setelah Indonesia merdeka, banyak masyarakat di berbagai daerah masih harus menanggung asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). **Pada bulan Juli 2026, Pantau Gambut mencatat kemunculan 15.067 titik panas. Angka ini naik 549 persen dibandingkan bulan sebelumnya.**

Peningkatan titik panas tersebut perlu menjadi perhatian karena mengindikasikan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah gambut. Pantau Gambut mencatat 5 provinsi dengan peningkatan titik panas yang mencolok pada Juli 2026:

Provinsi	Jumlah Titik Panas Juni 2026	Jumlah Titik Panas Juli 2026	Kenaikan
Kalimantan Barat	244	4.874	1.897,5%
Papua Selatan	757	4.220	457,6%
Kalimantan Tengah	125	2.821	2.156,8%
Aceh	298	804	169,7%
Riau	302	359	18,8%

Catatan:

* Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan jumlah titik panas tertinggi

** Kalimantan Tengah mengalami lonjakan paling drastis setelah konsisten di bawah 200 titik/bulan sejak Januari 2026.

Ancaman ini diperparah oleh El Niño kuat yang menurut BMKG diprediks bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama 2027, sementara puncak musim kemarau umumnya terjadi pada Agustus dan September 2026. Dalam kondisi ini, 24,2 juta hektare Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di seluruh Indonesia perlu menjadi prioritas pemerintah untuk melalui kebijakan pencegahan yang menjaga fungsi hidrologis gambut. Tanpa langkah tersebut, risiko terulangnya krisis kebakaran seperti pada 2015 akan semakin besar.

Temuan ini memperlihatkan jurang antara klaim kemajuan pembangunan dan realitas keselamatan warga. Alih-alih menikmati buah kemerdekaan, masyarakat di sekitar KHG masih menghadapi krisis ekologis yang berulang.

“Lonjakan titik panas sebesar 549 persen dalam satu bulan merupakan peringatan keras bahwa pendekatan reaktif tidak lagi dapat dipertahankan. Pemerintah tidak boleh terus menunggu api membesar, lalu membiarkan masyarakat menanggung akibat dari pencegahan yang terlambat,” kata

Iola Abas, Direktur Eksekutif Pantau Gambut. Menurut Iola, pembangunan tidak boleh dijalankan dengan mengorbankan fungsi ekologis gambut dan keselamatan masyarakat. Gambut tidak boleh terus diperlakukan sebagai ruang kosong yang dapat dikeringkan, dan dialihkan untuk kepentingan jangka pendek.

Peningkatan titik panas tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan penelusuran terhadap lokasi dan faktor yang membuat wilayah gambut terus rentan terbakar, termasuk kondisi tutupan lahan, tata air, serta aktivitas di dalam konsesi dan kawasan proyek pembangunan. Hasil penelusuran ini harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat pencegahan dan memastikan pemulihan dilakukan di area yang mengalami kerusakan.

“Memerdekakan gambut berarti memastikan masyarakat tidak terus menanggung biaya dari Keputusan pembangunan yang mengabaikan risiko ekologis. Tidak ada kemerdekaan yang sejati selama asap karhutla masih merampas hak warga untuk bernapas lega,” tutup Iola.

Kontak Media

Untuk informasi lebih lanjut mengenai publikasi ini, Anda dapat menghubungi:

- **Putra Saptian (Campaigner Pantau Gambut)**
putra@pantaugambut.id
- **Yoga Aprillianno (Communications Lead Pantau Gambut)**
yoga.aprillianno@pantaugambut.id

Kenapa Gambut Penting

Indonesia memiliki gambut tropis terluas di dunia dengan luas mencapai 13,43 juta hektare yang tersebar di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Lahan gambut Indonesia menyimpan sekitar 57 gigaton karbon atau sekitar 20 kali lebih banyak dibandingkan tanah mineral biasa. Ketika lahan gambut dikeringkan atau dialihfungsikan, cadangan karbon tersebut akan terlepas ke atmosfer dalam bentuk gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim.

Selain berfungsi sebagai penyimpan karbon, gambut juga berperan penting dalam mengatur tata air, mengurangi risiko banjir dan kekeringan, serta menjadi habitat bagi berbagai keranekaragaman hayati. Karena itu, melindungi gambut merupakan bagian penting dari upaya mitigasi perubahan iklim. Informasi lebih lanjut mengenai gambut dapat diakses melalui tautan pantaugambut.id/pelajari.

Tentang Pantau Gambut

Pantau Gambut adalah organisasi non-pemerintah yang berjejaring di sembilan provinsi di Indonesia dan berfokus pada riset, advokasi dan kampanye untuk mendorong perlindungan dan pengelolaan gambut yang berkelanjutan. Pantau Gambut juga memantau komitmen pemerintah, organisasi independen, dan sektor swasta dalam perlindungan serta restorasi gambut, sekaligus mendorong keterlibatan publik dalam mengawasi tata kelola ekosistem lahan basah ini melalui berbagai kanal komunikasi dan kampanye.